

Strategi Peningkatan Investasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Arifudin

¹ Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

* Correspondence e-mail; arifudinbima96@gmail.com

Article history

Submitted: 2023/12/10; Revised: 2023/12/20; Accepted: 2023/12/30

Abstract

In order to identify and solve regional investment problems and synergize them with national strategies, it is necessary to develop a policy framework to create conducive conditions for investment in the NTB Province. The aim of this research is to determine the potential, opportunities and investment factors in West Nusa Tenggara Province as well as the government's efforts in developing investment in West Nusa Tenggara Province. The population in this study was 39 people with a sample of 17 respondents consisting of parties directly related to investment issues in NTB Province consisting of Government Apparatus (BAPPEDA for Economic Sector, Investment and One-Stop Integrated Services Service, and Regional Secretariat. Economy) as well as from the Employers' Association (KADIN and Investors/Entrepreneurs). Sample determination was carried out using the purposive quota sampling method. These research variables are in accordance with those used by KPPOD in its research regarding regional investment attractiveness in 2019, namely including institutional, social political, regional economic, labor and physical infrastructure variables. The analytical tool used is AHP (Analytical Hierarchy Process). Based on research results, investment potential and opportunities in NTB Province are in the agricultural sector, trade, hotel and restaurant sector, processing industry sector, and services sector. Meanwhile, the determinant of investment attractiveness that has the greatest weight is institutional factors with a weight of 34.1%, followed by socio-political factors at 17.3%. In third place is the labor factor with a weight of 16.6% and in fourth place is the physical infrastructure factor at 16.2%. Lastly is the regional economic factor with a weight of 15.8%.

Keywords

Investment; West Nusa Tenggara; Strategy



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan daya saing daerah dalam

menghadapi tantangan globalisasi menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan daerah melalui pemberian kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal. Pemerintah pusat, sesuai regulasi, bertransisi menjadi pemantau, pengawas, dan pengevaluasi, sedangkan kewenangan pengelolaan urusan rumah tangga daerah diberikan kepada masyarakat setempat.

Otonomi daerah yang diperkenalkan pada tahun 2004 memiliki tujuan utama untuk membebaskan pemerintah pusat dari tanggung jawab yang tidak perlu dalam mengurus urusan domestik, sehingga pemerintah pusat dapat lebih fokus pada pemahaman dan respons terhadap dinamika global. Seiring waktu, desentralisasi memberikan dampak positif dengan memberdayakan daerah secara signifikan. Ini mendorong inisiatif dan kreativitas lokal, memperkuat kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan domestik.

Investasi memegang peranan yang sangat krusial dalam perekonomian, yang dapat dianalisis dari dua perspektif utama. Pertama, karena investasi merupakan komponen pengeluaran yang besar dan cenderung fluktuatif, hal ini sering kali mencerminkan perubahan dalam permintaan agregat yang kemudian memengaruhi siklus bisnis. Kedua, investasi merujuk pada proses akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi ketika sebagian dari pendapatan disisihkan dan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan output dan pendapatan di masa mendatang. Proses ini melibatkan pengadaan pabrik baru, mesin, peralatan, dan bahan baku, yang secara fisik meningkatkan stok modal suatu negara dan berpotensi memberikan kontribusi pada peningkatan produksi di masa depan.

Penelitian tersebut berfokus pada dinamika jumlah perusahaan dalam dan luar negeri, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyerapan tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 terdapat 1.055 perusahaan (PMA dan PMDN) dengan investasi PMDN sebesar Rp749.088.263.706 dan investasi PMA sebesar Rp535.743.975.373, mempekerjakan 85.501 tenaga kerja. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah perusahaan bertambah menjadi 3.869 dengan investasi PMDN sebesar Rp6.582,4 dan investasi PMA sebesar Rp7,01 triliun yang menyerap 113.430 tenaga kerja. Pada tahun 2021, terdapat 3.620 perusahaan dengan investasi PMDN sebesar Rp244.173 dan investasi PMA sebesar Rp9.090.454 dengan mempekerjakan 3.010 tenaga kerja. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan mencapai 1.290 perusahaan dengan investasi PMDN sebesar Rp14.177.661.576.421 dan investasi PMA sebesar Rp7.429.012.296.895 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.890 orang. Pada tahun

2023, investasinya diproyeksikan sebesar Rp6,4 triliun (PMDN) dan Rp1,4 triliun (PMA), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.730 individu.

Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami fluktuasi pada tahun 2019 hingga tahun 2023, mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 dari Rp90.984.979.000 pada tahun 2019 menjadi Rp33.172.906.012 pada tahun 2020. Namun kembali meningkat menjadi Rp42.661.705.636 pada tahun 2020 dan semakin meningkat menjadi Rp79.383.520.089 pada tahun 2021. Sebaliknya, nilai Penanaman Modal Asing (PMA) baru mulai meningkat pada tahun 2008, naik dari Rp58.856.744.690 pada tahun 2007 menjadi Rp75.636.244.690. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN menunjukkan peningkatan yang konsisten yaitu sebanyak 6.855 pekerja pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 7.490 pekerja pada tahun 2021.

Beberapa karya sebelumnya yaitu penelitian "Kajian Strategi Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" oleh Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik pada tahun 2007 menggunakan Analisis Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi daya tarik investasi di Kabupaten Kulon Progo. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki bobot paling besar (31%), diikuti oleh faktor sosial politik (26%), ekonomi daerah (17%), serta tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik masing-masing sebesar 13% (Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik, 2007). Dalam penelitian "Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY" oleh Mudrajad Kuncoro dan Anggi Rahajeng (2005), pengusaha/pelaku usaha sebanyak 55 responden menunjukkan bahwa kelembagaan, infrastruktur fisik, dan sosial politik menjadi faktor utama yang mempengaruhi daya tarik investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan bobot masing-masing sebesar 25%, 24%, dan 23% (Mudrajad Kuncoro dan Anggi Rahajeng, 2005). Ahmad Jazuli Rahman, Aris Soelistyo, dan Syamsul Hadi (2016) melakukan penelitian kuantitatif mengenai dampak investasi, pengeluaran pemerintah, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota/kabupaten di Provinsi Banten pada tahun 2010 hingga 2014. Hasil temuan menunjukkan bahwa total investasi (baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri) dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan tenaga kerja menunjukkan pengaruh negatif di Provinsi Banten (Ahmad Jazuli Rahman, Aris Soelistyo, dan Syamsul Hadi, 2016). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui potensi dan peluang dan faktor-faktor investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta upaya pemerintah dalam pengembangan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan fokus pada analisis data numerik yang diolah melalui metode statistik. Populasi penelitian ini terdiri dari entitas yang terkait langsung dengan permasalahan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu 39 orang dari aparatur pemerintah dan 36 orang dari asosiasi dunia usaha. Kuota sampel, yang terdiri dari 17 responden, dipilih secara strategis untuk mencerminkan tantangan terkait investasi di provinsi NTB. Klasifikasi pengambilan sampel didasarkan pada pemangku kepentingan di sektor penanaman modal di provinsi NTB, dengan subkelompok pejabat pemerintah dan perwakilan dunia usaha. Pengumpulan data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner, dan data sekunder yang diperoleh dari catatan yang ada seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan laporan pada investasi NTB.

Dari segi analisis, penelitian ini menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menilai faktor-faktor penentu daya tarik investasi dan merumuskan strategi kebijakan berdasarkan persepsi para ahli terhadap investasi di provinsi NTB. Rumus yang digunakan untuk menghitung konsistensi meliputi Indeks Konsistensi (CI) dan Rasio Konsistensi (CR). CI mengukur konsistensi rata-rata vektor, sedangkan CR menilai rasio konsistensi dibandingkan dengan Indeks Acak (RI). Analisis konsistensi dimulai pada tahap pra penelitian, fokus pada perumusan penelitian dan klarifikasi masalah penelitian, dilanjutkan hingga proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 -2023

No	Sektor	2007	%	2008	%	2009	%
1	Pertanian	1.388.908,06	46,88	1.576.906,55	47,33	1.699.657,09	47,42
2	Pertambangan & Penggalian	19.668,83	0,66	21.009,20	0,63	21.431,98	0,60
3	Industri Pengolahan	333.522,42	11,27	361.723,86	10,80	378.024,48	10,55
4	Listrik, gas, & Air Bersih	28.388,91	0,96	31.427,38	0,94	33.101,80	0,92
5	Bangunan/ Konstruksi	118.778,37	4,01	134.512,45	4,04	146.478,14	4,09
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	364.125,03	12,29	410.717,79	12,33	439.987,10	12,28
7	Angkutan dan Komunikasi	191.389,86	6,46	214.287,09	6,43	231.463,57	6,46
8	Bank, Lembaga Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	178.025,99	6,01	200.639,93	6,02	217.061,79	6,06

9	Jasa-jasa	339.782,32	11,47	380.837,51	11,43	417.006,96	11,63
PDRB		2.962.993,79	100	3.332.061,77	100	3.584.212,92	100
Penduduk Pertengahan Tahun		775.878		780.850		787.106	
PDRB/kapita (Rp)		3.818.819,36		4.267.223,88		4.553.659,76	

Sumber: BPS, NTB Dalam Angka 2020

Dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diatas menunjukkan PDRB Provinsi NTB mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,24% per tahun. Pada tahun 2019 PDRB sebesar Rp 2.962.993,79 kemudian meningkat menjadi Rp 3.332.061,77 pada tahun 2008 dan Rp 3.584.212,92 pada tahun 2020. Untuk PDRB/Kapita juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2021 sebesar Rp 4.267.223,88 meningkat menjadi Rp 4.553.659,76 ditahun 2021. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar terhadap jumlah PDRB yaitu sebesar 47,42% kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 12,28% dan 11,63%, sedangkan sektor yang paling sedikit menyumbang PDRB ditahun 2022 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,60%.

Table 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 -2022

N o	Sektor	2019	%	2020	%	2022	%
1	Pertanian	822.106,98	48,96	850.722,87	48,86	883.489,87	48,78
2	Pertambangan & Penggalian	12.216,42	0,73	12.420,06	0,71	12.433,72	0,69
3	Industri Pengolahan	184.538,78	10,99	189.240,06	10,87	193.794,50	10,70
4	Listrik, gas, & Air Bersih	11.679,54	0,70	12.038,16	0,69	12.440,24	0,69
5	Bangunan/ Konstruksi	68.285,64	4,07	71.286,50	4,09	75.569,28	4,17
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	198.945,05	11,85	207.083,68	11,89	216.650,94	11,96
7	Angkutan dan Komunikasi	100.607,61	5,99	106.518,67	6,12	112.448,81	6,21
8	Bank, Lembaga Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	103.117,94	6,14	107.422,62	6,17	112.138,48	6,19
9	Jasa-jasa	177.651,21	10,58	184.415,44	10,59	192.087,12	10,61
PDRB		1.679.149,17	100	1.741.148,31	100	1.811.092,67	100
Penduduk Pertengahan Tahun		775.878		780.850		787.106	
PDRB/kapita (Rp)		2.164.192,27		2.229.811,49		2.300.951,42	

Sumber: BPS, NTB Dalam Angka 2020

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi NTB selama kurun waktu 2020-2023 juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB Provinsi NTB sebesar Rp 1.679.149,17 kemudian meningkat menjadi Rp 1.741.148,31 pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi Rp 1.811.092,67. Selama kurun waktu tersebut, sektor pertanian menjadi sektor yang menyumbangkan PDRB terbesar, kemudian diurutan kedua dan ketiga diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, & restoran, sektor industri pengolahan. Sektor jasa-jasa dan sektor bank, lembaga keuangan, persewaan& jasa perusahaan masing-masing menempati urutan keempat dan kelima. Kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor angkutan& komunikasi, dan sektor bangunan. Diurutan terakhir adalah sektor pertambangan&

penggalian, dan sektor listrik, gas, & air bersih sebagai sektor yang paling kecil dalam menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi NTB.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2019-2023

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2019	2461652.00	2608733.00	5,287,577
2	2020	2,675,705	2,694,626	5,370,331
3	2021	2,694,886	2,710,499	5,405,385
4	2022	2,759,148	2,775,435	5,534,583
5	2023	2,781,187	2,795,805	5,576,992

Sumber: BPS, NTB Satu Data 2019

Jumlah penduduk di Provinsi NTB mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 19,61% per tahun, pada tahun 2021 penduduk Provinsi NTB berjumlah 5,405,385 orang dengan rincian 2,694,886 laki-laki dan 2,710,499 perempuan. Ditahun 2019 penduduk Provinsi NTB meningkat menjadi 5,287,577 orang dan ditahun 2020 berjumlah 5,370,331 orang dengan rincian 2,675,705 laki-laki dan 2,694,626 perempuan. Pada tahun 2022 penduduk Provinsi NTB berjumlah 5,534,583 orang kemudian ditahun 2023 meningkat menjadi 5,576,992 orang dengan rincian 2,781,187 laki-laki dan 2,795,805 perempuan.

Tabel 4 Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi NTB tahun 2020

Pendidikan	Pencari Kerja		Jumlah
	L	P	
Sekolah Dasar (SD)	845	903	1.748
SMPT	387	742	1.129
SMTA	946	453	1.399
Diploma (D1/D2)	91	59	150
Sarjana Muda (D3)	126	234	360
Sarjana (S1)	447	512	959
Jumlah 2020	2.842	2.903	70.45
2021	3165	4436	70.57
2022	8699	12477	70.93

Sumber: BPS, NTB Dalam Angka 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB berfluktuasi dari tahun 2005-2009. Pencari kerja terbanyak adalah tenaga kerja yang berpendidikan SD dengan jumlah 1.748 orang, kemudian adalah pencari kerja berpendidikan SMTA dengan jumlah 1.399 orang, diurutkan ketiga adalah pencari kerja berpendidikan SMPT dengan jumlah 1.129 orang, berikutnya adalah pencari kerja lulusan Sarjana (S1) dan Sarjana Muda (D3) masing-masing berjumlah 959 dan 360 orang. Pencari kerja berpendidikan Diploma (D1/D2) menempati urutan terakhir dengan jumlah 150 orang.

Provinsi NTB menghasilkan tanaman pangan yang sebagian besar berada di dataran rendah, antara lain padi, ubi jalar, ubi kayu, dan kacang tanah. Selain itu, sebagian buah-buahan juga tumbuh di daerah tersebut, seperti durian, manggis, salak, dan duku.

Sedangkan untuk daerah atas atau dataran tinggi, sebagian besar menghasilkan tanaman hortikultura seperti kentang, kubis dan bawang daun, serta sayur-sayuran lainnya.

Tabel 5 Jenis komoditas, luas lahan dan rata-rata produksi/tahun

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Rata-rata Produksi (ton/tahun)
1	Padi	789,91	10.168,69
2	Jagung	304,78	353,06
3	Kedelai	1.114,00	12.327,00
4	Kacang Tanah	3.257,00	70.617,00
5	Kacang Hijau	625,75	4.747,70
6	Ubi Kayu	2.074,78	14.225,22
7	Ubi Jalar	3.157,19	14.338,47

Sumber : BPS, NTB Satu Data 2020

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanaman ubi merupakan komoditas dengan rata-rata produksi tertinggi selama 10 tahun terakhir, mencapai 70.617 ton/tahun. Disusul oleh tanaman ubi jalar dengan rata-rata produksi sebesar 47.711 ton/tahun. Komoditas lainnya seperti tanaman kedelai, ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, tanaman padi besar, dan kacang tanah menempati peringkat berikutnya dengan produksi yang beragam.

Metode AHP digunakan untuk menghitung bobot faktor dan melakukan peringkat terhadap bobot faktor penentu daya tarik investasi daerah. Penelitian ini memecah masalah investasi daerah ke dalam beberapa faktor penentu daya tarik investasi, mengikuti variabel yang ditetapkan oleh KPPOD. Tabel matriks pairwise faktor penentu daya tarik investasi menjadi dasar penilaian dalam analisis ini.

Tabel 6 Matriks Pairwise Faktor Penentu Daya Tarik Investasi

Faktor	Kelembagaan	Sosial Politik	Ekonomi Daerah	Tenaga Kerja	Infrastruktur
Kelembagaan	1	3.6	3.5	1.3	1.0
Sosial Politik		1	2.2	1.1	1.0
Ekonomi Daerah			1	2.0	1.3
Tenaga Kerja				1	1.6
Infrastruktur					1

Sumber: Data Primer, diolah.

Matriks diatas menunjukkan tingkat kepentingan setiap faktor / variabel terhadap faktor / variabel lainnya. Hasil perhitungan menemukan besarnya koefisien faktor kelembagaan terhadap faktor sosial politik sebesar 3.6, koefisien faktor kelembagaan terhadap faktor ekonomi daerah sebesar 3.5, menunjukkan bahwa faktor kelembagaan lebih penting bila dibandingkan dengan faktor sosial politik dan faktor ekonomi daerah. Besarnya koefisien faktor sosial politik dibanding faktor ekonomi daerah sebesar 2.2, menunjukkan bahwa faktor sosial politik lebih penting dibanding faktor ekonomi daerah. Sedangkan besarnya koefisien faktor sosial politik terhadap faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur adalah 1.1 yang menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut sama pentingnya. Besarnya koefisien faktor kelembagaan dibanding faktor tenaga kerja sebesar 1.3, begitu pula dengan koefisien faktor ekonomi daerah terhadap faktor infrastruktur. Untuk faktor ekonomi daerah dan faktor tenaga kerja koefisiennya sebesar 2.0, dan besarnya koefisien faktor tenaga kerja

terhadap faktor infrastruktur adalah 1.6 yang menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja sedikit lebih penting bila dibandingkan dengan faktor infrastruktur.

Tabel 7 Bobot Level Pertama Penentu Daya Tarik Investasi

Faktor	Bobot	Prosentase	Ranking
Kelembagaan	341	34.1%	1
Sosial Politik	173	17.3%	2
Ekonomi Daerah	158	15.8%	5
Tenaga Kerja	166	16.6%	3
Infrastruktur Fisik	162	16.2%	4
Jumlah	999	99.9%	

Sumber: Data Primer, diolah.

Hasil perhitungan Matriks Priority Vector Penentu Daya Tarik Investasi menunjukkan bahwa pada level pertama faktor kelembagaan merupakan faktor daya tarik investasi yang paling penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan bobot 34.3%, urutan kedua sebagai faktor daya tarik investasi yang penting adalah faktor sosial politik dengan bobot nilai sebesar 17.1%. Di urutan ketiga sebagai faktor penentu daya tarik investasi adalah faktor tenaga kerja dengan bobot 16.8%, kemudian diurutkan keempat diikuti oleh faktor infrastruktur fisik dengan bobot 16.1% dan terakhir ditempati oleh faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 15.6%.

Tabel 8 Bobot Level Pertama dan Kedua Penentu Daya Tarik Investasi

Level Pertama		Level Kedua		Bobot Final
Faktor	Bobot	Variabel	Bobot	
Kelembagaan	341	Kepastian Hukum	511	1.92
		Perda	287	1.08
		Aparatur Pemerintah	202	0.76
Sosial Politik	173	Sosial Politik	353	0.73
		Keamanan	472	0.98
		Budaya	176	0.36
Ekonomi Daerah	158	Potensi Ekonomi	756	0.89
		Struktur Ekonomi	244	0.29
Tenaga Kerja	166	Ketersediaan Tenaga Kerja	643	0.94
		Biaya Tenaga Kerja	357	0.63
Infrastruktur Fisik	162	Ketersediaan Infrastruktur Fisik	600	0.92
		Kualitas Infrastruktur Fisik	400	0.51
Total				10.00

Sumber: Data Primer, diolah

Stakeholder di Provinsi NTB menilai faktor kelembagaan sebagai aspek terpenting dalam menarik investor, dengan variabel kepastian hukum menjadi yang paling signifikan (51.1%). Faktor ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menarik minat investor. Faktor sosial politik juga memegang peranan penting, di mana variabel keamanan mendominasi (47.2%), diikuti oleh variabel sosial politik (35.3%) dan budaya (17.6%). Faktor ini berkaitan dengan hubungan sosial politik di antara masyarakat, pemerintah, dan bisnis di Provinsi NTB. Dalam aspek tenaga

kerja, ketersediaan tenaga kerja di daerah tersebut dianggap sebagai variabel paling krusial, dengan bobot sebesar 64.3%, melebihi bobot variabel biaya tenaga kerja (35.7%). Evaluasi ini dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk usia produktif, rasio pencari kerja, dan tingkat upah melalui Upah Minimum Provinsi (UMP).

Faktor infrastruktur fisik juga menjadi pertimbangan penting bagi investor, dengan variabel ketersediaan infrastruktur fisik mendominasi (60.0%), mengungguli variabel kualitas infrastruktur fisik (40.0%). Semakin baik ketersediaan dan kualitas infrastruktur, semakin tinggi daya tarik investasi. Meskipun demikian, faktor ekonomi daerah dinilai sebagai yang paling kurang signifikan, terutama melalui variabel potensi ekonomi yang mendominasi (75.6%), sementara variabel struktur ekonomi memiliki bobot lebih rendah (24.4%). Evaluasi ini berhubungan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif di Provinsi NTB.

Tabel 9 Bobot Final Variabel Penentu Daya Tarik Investasi

Variabel Penentu Investasi	Bobot Final	Ranking
Kepastian Hukum	0.192	1
Regulasi	0.108	2
Keamanan	0.098	3
Ketersediaan Tenaga Kerja	0.094	4
Ketersediaan Infrastruktur Fisik	0.092	5
Potensi Ekonomi	0.089	6
Aparatur Pemerintah	0.076	7
Sosial Politik	0.073	8
Biaya Tenaga Kerja	0.063	9
Kualitas Infrastruktur Fisik	0.051	10
Budaya Masyarakat	0.036	11
Struktur Ekonomi	0.029	12

Sumber: Data Primer, diolah

Variabel kepastian hukum menempati urutan pertama dalam penentu daya tarik investasi di Provinsi NTB dengan bobot sebesar 19.2%. Peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh variabel regulasi dan variabel keamanan dengan bobot masing-masing sebesar 10.8% dan 9.8%. Kemudian disusul oleh variabel ketersediaan tenaga kerja dan variabel ketersediaan infrastruktur fisik diurutan keempat dan kelima dengan bobot sebesar 9.4% dan 9.2%. Variabel potensi ekonomi dengan bobot sebesar 8.9% diurutan keenam, variabel aparatur pemerintah diurutan berikutnya dengan bobot sebesar 7.6%, kemudian ada variabel sosial politik dan variabel biaya tenaga kerja diurutan kedelapan dan kesembilan dengan bobot masing-masing sebesar 7.3% dan 6.3%. Sedangkan diurutan tiga terbawah sebagai penentu daya tarik investasi di Provinsi NTB adalah variabel kualitas infrastruktur fisik dengan bobot sebesar 5.1%, dan variabel budaya masyarakat serta variabel struktur ekonomi dengan bobot masing-masing 3.6% dan 2.9%.

Pemerintah Provinsi NTB telah mengambil beberapa langkah untuk menarik investasi PMA dan PMDN, termasuk reformasi birokrasi layanan investasi, pembangunan sistem informasi potensi investasi, dan peningkatan infrastruktur fisik. Meskipun telah ada inisiatif positif, masih diperlukan upaya menyeluruh. Perbaikan iklim investasi menjadi kunci, terutama dalam mengatasi kelemahan kepastian hukum, stabilitas sosial politik, dan keamanan di Provinsi NTB. Rendahnya investasi, baik dari investor lokal maupun asing,

mempengaruhi sektor riil dan tingkat pengangguran. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menentukan daya tarik investasi; kebijakan yang mendukung pengembangan investasi dan respons positif terhadap dunia usaha sangat penting. Lembaga pelayanan dan sistem pelayanan yang efisien juga menjadi faktor penentu, dengan perluasan program proaktif untuk mempromosikan keunggulan daerah dan menyederhanakan prosedur investasi. Kerjasama antar daerah, perbaikan infrastruktur fisik, dan pembangunan baru menjadi langkah strategis, karena infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan usaha dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja.

Pembahasan

Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Provinsi NTB

Hasil pembobotan faktor-faktor penentu daya tarik investasi daerah menunjukkan bahwa kondisi daya tarik investasi daerah masih berada dalam kondisi yang belum normal. Dalam keadaan normal semestinya bobot yang lebih besar adalah untuk faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja, dan faktor infrastruktur fisik sebagai pertimbangan untuk keputusan berinvestasi. Bila faktor kelembagaan dan faktor sosial politik yang dimiliki oleh suatu daerah sudah normal, seharusnya dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, faktor utama yang dilihat oleh investor adalah pada faktor ekonomi daerah yang meliputi variable potensi ekonomi dan variable struktur ekonomi, serta faktor tenaga kerja dan faktor infrastruktur fisik (KPPOD, 2002:42).

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari tim Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam pemeringkatan daya tarik investasi 214 Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2004 dimana faktor kelembagaan dengan prosentase sebesar 31% dan faktor sosial politik sebesar 26% menjadi faktor yang paling dominan dalam daya tarik investasi di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian diikuti oleh faktor ekonomi daerah 17%, faktor tenaga kerja, dan faktor infrastruktur fisik diurutan terakhir masing-masing dengan prosentase sebesar 13% (KPPOD, 2004:22).

Dalam mengembangkan investasi daerah di Provinsi NTB maka diperlukan strategi yang tepat untuk merumuskan kebijakan agar semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal/berinvestasi di Provinsi NTB. Dari hasil perhitungan faktor dan variabel penentu daya tarik investasi melalui alat bantu komputer Expert Choice 9 diperoleh hasil bahwa faktor kelembagaan merupakan faktor yang paling penting dalam menarik investor dengan bobot sebesar 34.3%, kemudian diikuti oleh faktor sosial politik sebesar 17.1%, faktor tenaga kerja sebesar 16.8% dan faktor infrastruktur fisik menempati urutan keempat dengan bobot sebesar 16.1%. Terakhir adalah faktor ekonomi daerah dengan bobot sebesar 15.6%.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Provinsi NTB relatif lebih dipengaruhi oleh faktor nonekonominya, terutama oleh faktor kelembagaan, faktor sosial politik, dan faktor ketersediaan infrastruktur fisik yang masing-masing menempati peringkat 1,2, dan 4, dibandingkan faktor ekonomi yaitu faktor tenaga kerja dan faktor ekonomi daerah yang menempati urutan 3, dan 5.

Faktor kelembagaan merupakan faktor terpenting dalam pembentukan daya tarik investasi di Provinsi NTB. Disinilah peran pemda sangat menentukan dalam arah kebijakan pembangunan serta keberhasilan dalam membentuk iklim yang kondusif bagi investor. Salah satunya keberhasilan dari aspek kelembagaan adalah kualitas pelayanan perijinan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Kondisi sosial politik juga menjadi faktor yang dominan dalam penentu daya tarik investasi di Provinsi NTB. Suatu kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh keamanan, sikap keterbukaan masyarakat, dan kondisi sosial politik yang kondusif. Namun, dari penelitian ini diketahui bahwa ada beberapa persoalan-persoalan khusus yang dihadapi terkait dengan daya tarik investasi daerah. Salah satunya adalah persoalan mengenai pungutan tidak resmi atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar birokrasi yang terjadi di lingkungan kegiatan usaha mereka. Pungutan-pungutan tidak resmi tersebut biasanya dilakukan oleh preman, dan sekelompok pemuda kampung. Pungutan tersebut dilakukan mulai dengan cara halus, seperti meminta sumbangan hingga menggunakan cara yang kasar untuk meminta "uang keamanan". Adanya pungli ini tentunya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat mengurangi daya saing usaha mereka.

Selain masalah pungli, ada juga permasalahan yang dialami oleh Perum Perhutani yang merupakan pelaku usaha di sektor kehutanan mengalami gangguan keamanan seperti penjarahan dan pengrusakan tanaman serta masalah etos kerja yang masih rendah dari masyarakat sekitar sehingga mengganggu kelancaran aktivitas usaha di sektor ini.

Tenaga kerja merupakan motor penggerak kegiatan usaha. Faktor tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor penentu daya tarik investasi yang mempunyai peranan penting. Provinsi NTB memiliki ketersediaan tenaga kerja yang besar dengan pendidikan yang memadai serta mempunyai keunggulan dari sisi biaya tenaga kerja yang relative lebih murah bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

Infrastruktur fisik merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha, semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan infrastruktur fisik juga akan semakin besar. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik ini sangat berpengaruh bagi kelancaran kegiatan usaha yang terjadi di Provinsi NTB. Meski tidak mempunyai sarana transportasi yang lengkap seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun. Namun, ketersediaan jalan darat dengan kualitas yang baik dapat memperlancar akses sehingga memudahkan mobilitas kegiatan usaha di Provinsi NTB.

Faktor ekonomi daerah adalah indikasi dari dari potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah yang juga merupakan pertimbangan penting dalam keputusan berinvestasi. Potensi ekonomi bisa dilihat dari potensi yang berbasis sumber daya alam, maupun potensi yang terbentuk karena didorong oleh aktivitas usaha atau karena adanya investasi. Dari sisi potensi ekonomi sumber daya alam Provinsi NTB tidak banyak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai. Selain itu juga kurang didukung oleh kegiatan ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan perkembangan ekonominya mengalami keterlambatan. Hal ini kemudian juga menyebabkan PDRB Perkapita Provinsi NTB menjadi relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten lain.

Peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi di Provinsi NTB

Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembenahan, mulai dari tata kelembagaan pemerintahan, perencanaan perekonomian daerah dan kemasyarakatan serta lain sebagainya. Di sisi lain, dengan berbagai alasan sering ditemukan praktik-praktik negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang justru mengurangi daya saing investasi daerah. Keterbatasan pemda dalam melakukan pembiayaan pembangunan perekonomian daerah sering dijadikan alasan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung terhadap penciptaan daya saing investasi.

Padahal dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus berupaya keras mendorong agar sebanyak mungkin investasi dapat masuk ke daerahnya. Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah yang bersangkutan.

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi NTB belum mampu dikelola dengan baik. Di sisi lain, tidak banyak pihak swasta yang berperan untuk mengelola potensi yang ada. Salah satu penyebab mengapa tidak banyak pihak swasta (baik dari daerah maupun dari luar daerah) yang berperan dalam mengelola potensi daerah adalah kurangnya pengetahuan mereka akan keberadaan potensi investasi yang ada di Provinsi NTB. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah kurang mampu dalam mengemas potensi ekonomi yang dimilikinya agar mampu menjadi suatu informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memiliki strategi investasi yang efektif dan efisien dalam rangka promosi investasi agar potensi dan peluang investasi yang ada di daerah tersebut diketahui oleh investor sehingga dapat dikelola dengan baik dan bisa berkembang.

Masalah birokrasi perizinan usaha diyakini masih menjadi faktor yang sangat signifikan dalam menciptakan daya tarik investasi. Salah satu bentuk kebijakan yang populer di tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah adalah perizinan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan dipandang oleh pemerintah daerah memiliki posisi yang penting, yaitu: di satu sisi merupakan wujud nyata dari kewenangan daerah, dan di sisi lain merupakan sumber pendapatan daerah.

Dalam konteks ini, maka tidaklah mengherankan apabila salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin banyaknya izin yang harus dikantongi oleh swasta dan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Konsekuensi dari banyaknya izin adalah banyaknya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat atau swasta untuk “melegalkan” kegiatan yang hendak mereka lakukan. Sehingga perbaikan pelayanan publik perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, agar tercipta pelayanan yang prima, mudah, murah dan cepat yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana tuntutan dunia usaha.

Pemerintah daerah juga harus berperan secara aktif dalam era otonomi daerah, dan harus bersaing secara baik untuk meraih investasi serta memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Investasi pada suatu daerah sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya investasi yang masuk ke daerah praktis dapat menambah pendapatan daerah, selain itu dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Untuk itu perlu adanya keterbukaan dalam persaingan memperoleh investasi agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses pengembangan investasi daerah. Meningkatkan koordinasi antar instansi agar lebih siap dalam menghadapi persaingan investasi daerah, menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka kegiatan investasi, dan kerjasama antara pihak legislatif dengan eksekutif dalam membuat kebijakan agar regulasi berpihak pada investor namun tidak merugikan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan signifikan. Pertama, sektor pertanian di Provinsi NTB memiliki potensi investasi tinggi, memberikan kontribusi sebesar 47.42% terhadap PDRB tahun 2019. Kedua, faktor kelembagaan menjadi penentu utama daya tarik investasi di NTB dengan bobot 34.1%, diikuti oleh faktor sosial politik (17.3%) dan tenaga kerja (16.6%). Ketiga, tiga faktor utama yang memengaruhi daya tarik investasi adalah kelembagaan, sosial politik, dan tenaga kerja. Keempat, variabel struktur ekonomi, budaya masyarakat, kualitas infrastruktur fisik, dan biaya tenaga kerja memiliki bobot terendah. Kelima, empat sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa, dan industri pengolahan, memberikan kontribusi signifikan sebesar 81.88% terhadap PDRB Provinsi NTB. Keenam, PDRB Provinsi NTB tahun 2020 didukung oleh empat sektor utama. Ketujuh, kebijakan pembenahan perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB terutama terkait variabel struktur ekonomi, budaya masyarakat, kualitas infrastruktur fisik, dan biaya tenaga kerja. Kedelapan, bobot variabel penentu daya tarik investasi memberikan panduan untuk fokus pembenahan. Kesembilan, analisis pembobotan menjadi landasan bagi perumusan strategi investasi di Provinsi NTB. Kesepuluh, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan kebijakan investasi di NTB.

REFERENCES

- Budiman, Arif. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Fatchan, H. Ach. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama).
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Hilmar, Aminuddin. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- H. Sidik, Salim dan Budi, Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Kairupan, David. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- KPPOD. 2004. *Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota di Indonesia*. Jakarta : KPPOD
- Kusumadmo, E. (2013). *Manajemen Strategik-Pengetahuan*. (Yogyakarta, Indonesia: Cahaya Atma Pustaka).
- Lusiana. (2012). *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Manan, H. Abdul. (2012). "Hukum Ekonomi Syari'ah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)". (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), Hal 152-153.
- Manan, H. Abdul. (2012). "Hukum Ekonomi Syari'ah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)". (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), Hal 155-159.
- Panjaitan, Hulman. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Ind-Hill Co).
- Panjaitan, Hulman dan Anner, M Sianipar. (2008). *Hukum Penanaman Modal asing*. (Jakarta:

CV Ind-Hill Co).

- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Rajagukguk, Erman. (2005). *Modul Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. (2009). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Salami, Rochani Urip. (2011) "Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial," *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No.3, hal. 440. Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Subagiyo, Rokhmat. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: Alim's Publishing).
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- KPPOD. 2004. *Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota di Indonesia*. Jakarta : KPPOD
- Suparji. (2010). *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. (Universitas Alazhar Indonesia, Jakarta).
- Tjiptono, Fandi. (2000). *Strategi Pemasaran*. Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi).
- Kaidah, Nur. (2018). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah. Lampung: *Jurnal Ilmia* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Rokhina, Intan. (2019). Strategi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menarik Investor Dalam dan Luar Negeri. Provinsi Kalimantan Utara: *Jurnal Ilmiah* (Provinsi Kalimantan Utara: Fakultas Administrasi Publik, Universitas Terbuka Jakarta).
- Yudistira, Angga. (2019). Manajemen Strategi Peningkatan Investasi Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Kota Surabaya: *Jurnal Ilmiah* (Kota Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya).